

ANALISIS KREDIT PERBANKAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Aldy A. Lolowang¹, Agnes Ch. P. Lopian², Een Novritha Walewangko³

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi*

E-mail: 1aldylolowang061@student.unsrat.ac.id, 2agneslopian@unsrat.ac.id, 3eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Berbagai program pemerintah baik bantuan sosial maupun permodalan usaha bahkan kebijakan terkait jumlah penduduk dan upah minimum provinsi sudah dilakukan tapi nyatanya kurang optimal dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Perlunya sinergitas pemerintah, masyarakat, dan perbankan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya nyata bersama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan dengan jangka waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kredit usaha rakyat, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Secara parsial kredit perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk Miskin

ABSTRACT

Various government programs, both social assistance and business capital, even policies related to population and provincial minimum wages, have been carried out but in fact are not optimal in reducing the number of poor people. The need for synergy between the government, community, and banks to evaluate and improve existing policies, especially the People's Business Credit (KUR) as a joint real effort to reduce the number of poor people in North Minahasa Regency. This study aims to determine the effect of bank credit, population, and provincial minimum wage on the number of poor people in North Minahasa Regency. As for the data used in this research was secondary data with a period from 2009 to 2022. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that simultaneously people's business credit, population, and provincial minimum wage have a significant affect the number of poor people. Partially, bank credit has a negative and significant effect on the number of poor people and population has no significant and negative effect on the number of poor people. Meanwhile, the provincial minimum wage has a positive and significant effect on the number of poor people.

Keywords: *People's Business Credit, Population, Provincial Minimum Wage, Number of Poor People*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu problem sangat mendasar yang selalu mengiringi sejarah dalam perkembangan pembangunan terjadi di berbagai macam negara terlebih khusus negara

berkembang (Walewangko, 2015). Dalam *Millenium Development Goals* (MDGs), kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara dunia (Sachs, 2012). Selama ini, pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat hingga daerah sudah gencar meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, anggaran yang besar digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan (Bhinadi, 2017).

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan dengan terus menerus untuk menuju suatu kondisi atau keadaan yang lebih baik dengan berdasarkan norma tertentu. (Riyadi & Bratakusumah, 2005).

Perbankan memang tidak pernah bisa luput dalam perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, bagaimana tidak perbankan sebagai lembaga intermediasi dikatakan menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Penjelasan singkatnya, kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi (Rumbayan, Rotinsulu, dan Maramis, 2022). Menurut Tambunan bila kemiskinan terjadi karena rendahnya pendapatan dan rendahnya produktifitas, maka pengurangan kemiskinan dibutuhkan investasi pada sumber daya manusia dan investasi modal fisik untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Jadi jalan terbaik untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kredit mikro kepada penduduk miskin guna menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka.

Menyalurkan kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah membuat program KUR (Kredit usaha Rakyat) yang berkerjasama dengan bank-bank pemerintah seperti Bank BRI dan bank pemerintah lainnya, bank pembangunan daerah, dan lembaga keuangan selain bank. KUR ini merupakan skema pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi para pelaku usaha UMKM dan Koperasi yang usahanya layak (*feasible*) namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan syarat perbankan (*bankable*) (Prayoga, 2014).

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu Indikator kemiskinan dimana jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu periode tertentu. Bagi pemerintah jumlah penduduk miskin merupakan target pembangunan yang perlu ditekan setiap tahun sampai dengan angka terendah. Apabila jumlah penduduk semakin banyak maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan banyak angkatan kerja yang menganggur sehingga menyebabkan pengangguran yang menimbulkan kemiskinan (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Hal yang lain jika kita melihat dari faktor upah minimum terutama dalam upah minimum provinsi (UMP) yang memiliki hubungan terhadap kemiskinan di Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Di dalam PP Nomor 78 mengenai Pengupahan Tahun 2015, upah minimum yang dimaksud pada Pasal 41 ayat 2 adalah upah minimum bulanan yang terdiri dari upah tanpa tunjangan serta upah pokok salah satunya tunjangan tetap. Kemiskinan yang terjadi di daerah seperti Kabupaten Minahasa Utara cenderung berkurang dengan adanya perkembangan faktor-faktor seperti Upah Minimum, karena semakin meningkatnya upah maka pendapatan masing-masing keluarga atau perseorangan semakin meningkat dan semakin meningkatnya pendapatan maka akan berdampak dalam mengurangi kemiskinan, didalam penelitian terdahulu oleh Vinni Alvionita (2014) menyatakan bahwa tingkat upah minimum provinsi mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kabupaten Minahasa Utara (sering disingkat Minut) dengan pusat pemerintahan dan ibu kota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung. Dengan

jarak dari pusat kota Manado ke Airmadidi sekitar 12 km yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebagian dari kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi terletak di wilayah Minahasa Utara.

Tabel 1
KUR Tahun 2015 – 2022

No	Tahun	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Minahasa Utara (Juta Rp)
1	2015	238.297
2	2016	303.517
3	2017	393.410
4	2018	524.952
5	2019	561.345
6	2020	475.033
7	2021	649.835
8	2022	654.354

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2015-2022)

Berdasarkan data Statistik Ekonomi Dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada delapan tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2022 terlihat bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 penyaluran KUR sebesar Rp. 238.297.000 terus meningkat sampai dengan penyaluran tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 654.354.000. Peningkatan penyaluran KUR terjadi seiring adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM dan saat ini ada sekitar 13 ribu UMKM menurut data Pemkab Minahasa Utara. KUR sangat penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha tetapi memiliki modal terbatas. Akses layanan jasa keuangan dapat menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan Masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan program lainnya sehingga perekonomian bisa tetap tumbuh. Ini didukung dengan hasil penelitian dari Jalilian & Kirk Patrick (2001), Honohan (2004), Zhuang, Juzhong et.al. (2009), dan Pradhan, Rudra P (2010) yang menyatakan bahwa Kredit Perbankan dengan Tingkat Kemiskinan mempunyai hubungan negatif dan signifikan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Tahun 2015 – 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara (Jiwa)
1	2015	198.084
2	2016	199.498
3	2017	200.985
4	2018	202.317
5	2019	203.624
6	2020	224.993
7	2021	226.915
8	2022	229.368

Sumber: BPS.go.id (2023)

Jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Utara untuk delapan tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2022 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara sebesar 198.084 jiwa kemudian terus terjadi peningkatan

hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 229.368 jiwa. Hal ini karena adanya peningkatan persentase Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 AHH Minahasa Utara mencapai 7,38% sesuai data BPS Kab. Minahasa Utara 2023.

Tabel 3
Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 – 2022

No	Tahun	Upah Minimum Regional/Provinsi Sulawesi Utara (Rupiah)
1	2015	2.150.000
2	2016	2.400.000
3	2017	2.598.000
4	2018	2.824.286
5	2019	3.051.076
6	2020	3.310.723
7	2021	3.310.723
8	2022	3.310.723

Sumber: BPS.go.id (2023)

Berdasarkan tabel Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara di delapan tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 upah minimum Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.150.000 terus meningkat sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.310.723. Sementara pada periode tahun 2020 – 2022 UMP Sulut tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 3.310.723 dikarenakan UMP Sulut 2020 – 2022 lebih tinggi dari batas atas upah minimum dan sesuai Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 Tanggal 31 Oktober 2020 dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19, dan Keputusan Gubernur Sulut No. 375, tanggal 16 november 2021 dengan mempertimbangkan “force majeure” (kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan) yaitu pandemi covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 1
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2022



Sumber: BPS.go.id (2023)

Grafik 2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2022



Sumber: BPS.go.id (2023)

Dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara pada delapan tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2022 berada di bawah Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Peningkatan tertinggi tingkat kemiskinan di Minahasa Utara terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,12%. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 turun secara drastis mencapai 6,93 % dan di tahun 2020 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan kembali mencapai 7,11 % atau sekitar 14,49 ribu jiwa penduduk miskin. Upaya menurunkan angka kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai program perlindungan sosial dan jasa keuangan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tetapi upaya ini belum optimal untuk meningkatkan pendapatan sehingga belum berkontribusi secara maksimal untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Penelitian ini menjadi menarik karena Kabupaten Minahasa Utara yang berada diantara Kota Manado dan Kota Bitung yang tentunya memiliki banyak akses untuk berbagai program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Minahasa Utara”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kredit usaha rakyat (KUR) mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?
2. Bagaimana jumlah penduduk mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?
3. Bagaimana upah minimum provinsi (UMP) mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?
4. Bagaimana Kredit perbankan, jumlah penduduk, Dan upah minimum provinsi (UMP) mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit usaha rakyat, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan dan BPS Kabupaten Minahasa Utara

Dapat memberikan pengetahuan bahkan masukan yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan kedepan agar dapat membantu dan mendukung Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Dapat memberikan sumbangan ide, gagasan pemikiran dan saran bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk kebijakan yang tepat mengenai jumlah penduduk dan upah minimum provinsi (UMP) sehingga berdampak pada pendapatan meningkat, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara

Memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan terlebih modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar masyarakat Kabupaten Minahasa Utara khususnya masyarakat miskin dapat memilih bank sebagai tempat melakukan peminjaman dana yang mudah, cepat, dan legal sehingga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan informasi dan pengembangan ilmu ekonomi pembangunan melalui pengujian empiris tentang analisis kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara serta mendapat pengalaman yang berguna bahkan menjadi referensi untuk membantu penelitian di masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut M. L. Jhingan (Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, 2016), perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk membangun perekonomian secara keseluruhan. Ia mencakup penerapan sistem pemilihan yang rasional terhadap sejumlah bidang investasi dan kekuatan pembangunan lainnya yang layak. Di perencanaan pembangunan, pemerintah merumuskan pembangunan bagi perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Kemiskinan

Menurut Muhadjir (2005) kemiskinan kultural merupakan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa akar kemiskinan itu pada ketidakpunyaan sumber daya ekonomi, seperti tanah dan modal, pendidikan dan keterampilan, karena pertambahan penduduk yang sangat pesat tidak seiring dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik.

Perbankan

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang

tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*to make loans*) (Sinungan, 2000).

Kredit

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/ borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (Rivai, Veithzal dan Andria, 2007: 4).

Penduduk

Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

Upah Minimum

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri atas:

1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen Upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Pasal 25 ayat (1) PP 36 tahun 2021 menyebut upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, dan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu. Berikut penjelasan jenis upah minimum:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, yang wajib ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya (pasal 27 ayat (1) PP 36/2021).
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. PP 36/2021 menyebut Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu (pasal 30 ayat (1) PP 36/2021).

Syarat tertentu yang dimaksud sehubungan dengan :

- a. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- b. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.

Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, atau dengan kata lain upah minimum Kabupaten/kota tidak lebih tinggi dari upah minimum Provinsi maka Gubernur tidak dapat menerapkan upah minimum bagi Kabupaten/kota. Jadi UMP dan UMK dapat sama nilainya.

Penelitian Terdahulu

Tiara F. Rizkiyah dan Nunung Nurhayati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi berganda membuktikan bahwa kredit BPR (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan dan bertanda negatif terhadap kemiskinan (Y). Produk domestik regional bruto (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bertanda negatif terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh yang signifikan dan bertanda positif terhadap kemiskinan.

Wita Utami dan Tianovida Siregar (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh UMR Dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi data panel membuktikan bahwa variabel UMR dan Penduduk Jiwa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dan hasil uji simultan (uji F) juga menunjukkan bahwa UMR dan Penduduk Jiwa secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

Saharuddin Didu & Ferri Fauzi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi berganda OLS membuktikan bahwa variabel populasi, variabel pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak. Secara simultan, ketiga variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak. Selanjutnya, koefisien R kuadrat menunjukkan nilai 0,947 atau 94,7%, yang berarti bahwa variasi kemiskinan di Kabupaten Lebak dapat dijelaskan oleh ketiga independent variabel tersebut.

Satria Yuda Anggriawan, Aris Soelistyo, dan Dwi Susilowati (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier data panel dengan metode Common Effect digunakan alat bantu software Eviews 6 membuktikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 5,088.144, variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tito Saputra, Een N. Walewangko, dan George M.V. Kawung (2022), dalam penelitiannya berjudul “Analisis Program Dana Kelurahan di Kota Kotamobagu (Studi Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat)” dengan menggunakan metode analisis data yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa secara simultan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kecamatan kotamobagu barat, secara parsial dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Kotamobagu Barat. Sedangkan alokasi dana kelurahan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Kajian Teori Diolah Penulis (2023)

Hipotesis

1. Diduga Kredit Usaha Rakyat berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Diduga Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Diduga bahwa Kredit Perbankan, Jumlah penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian ini meliputi Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series periode 2009 – 2022.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari website BPS Minahasa Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

yang terkait dengan Kredit Perbankan untuk Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara, dan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara.

2. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah, Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Jumlah penduduk miskin (Y) adalah Jumlah orang miskin yang bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara setiap tahunnya diukur dalam satuan jiwa.
2. Kredit usaha rakyat (X₁) adalah kredit atau pinjaman yang diberikan pihak perbankan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang diukur dalam rupiah.
3. Jumlah penduduk (X₂) adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara setiap tahunnya yang diukur dalam satuan jiwa.
4. Upah minimum provinsi (UMP) (X₃) adalah upah minimum tanpa tunjangan yang diterima oleh pekerja yang bekerja di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) sama dengan UMP dengan syarat tertentu tidak terpenuhi yaitu Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi. Jadi UMK akan mengikuti besaran UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam rupiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Variabel Independen Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Variabel Dependen Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara untuk tahun 2009 – 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel 2021 dan *Eviews* 0.8.

Model regresi yang dimana variabel dependen (*regresan*) Y dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel penjelas (*Regresor*) X dikenal dengan analisis regresi majemuk atau model regresi linier berganda (Gujarati, 2011). Model dasar regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1.1)$$

Berdasarkan model dasar di atas kemudian diubah ke dalam model logaritma natural (ln) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\log Y = b_0 + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + b_3 \log X_3 + e \dots\dots\dots (1.2)$$

Keterangan

- Y = Jumlah Penduduk Miskin
- X₁ = Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- X₂ = Jumlah Penduduk
- X₃ = Upah Minimum Provinsi (UMP)

- b_0 = Konstanta
 b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi parsial untuk masing-masing X_1, X_2, X_3
 e = *error term*

Sebelum memulai cara menginterpretasikannya, akan diperkenalkan beberapa model yang menggunakan transformasi logaritma sebagai berikut:

1. Model Linier-Log: $Y_i = a + \beta \log X_i + \varepsilon_i$
2. Model Log-Linier: $\log Y_i = a + \beta X_i + \varepsilon_i$
3. Model Log-log: $\log Y_i = a + \beta \log X_i + \varepsilon_i$

Ketiga model tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam menginterpretasikan nilai koefisien regresi dalam bentuk logaritma. Interpretasi tiga model tersebut sebagai berikut:

1. Model Linier-Log

Interpretasi langsung dapat dilakukan dengan menyebutkan bahwa peningkatan nilai log X sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Y sebesar satu. Tentu ini akan sulit dimengerti, maka kita dapat melakukan interpretasi dengan cara yang lain, yaitu peningkatan X sebesar satu persen akan meningkatkan Y sebesar 0.01. Dapat dilihat bahwa nilai β dikalikan dengan 0.01, untuk pembuktiannya dapat dilihat pada (Gujarati, 2003, hal 181-182) atau (Benoit, 2011, hal 3-4).

2. Model Log-Linier

Sama halnya dengan model linier-log, interpretasi langsung dapat diungkapkan seperti peningkatan nilai X sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai log Y sebesar β satuan. Interpretasi yang lebih bermakna dapat dilakukan sebagai berikut, peningkatan X sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Y sebesar 100 β persen. Dapat dilihat bahwa nilai dari β dikali 100 sehingga bentuk peningkatannya dalam persen atau pertumbuhan, pembuktiannya dapat dilihat pada (Gujarati, 2003, hal 179-180) atau (Benoit, 2011, hal 4).

3. Model Log-Log

Model ini dapat diinterpretasikan langsung dimana keduanya dalam bentuk persen. Peningkatan X sebesar satu persen akan meningkatkan nilai Y sebesar β satuan. Pembuktiannya dapat dilihat pada (Gujarati, 2003, hal 176) atau (Benoit, 2011, hal 4).

Uji Statistik

1. Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Menurut Ghozali (2009) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel Kredit BPR, LPP, dan UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara. dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F Hipotesis:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n = 0$, berarti variabel bebas (X) tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n \neq 0$, berarti variabel bebas (X) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Uji determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2009).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 145) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera* dan probabilitasnya yang mendeteksi data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan Uji *Jarque-Bera* ini dalam program *Econometric Views* (Eviews). Untuk melihat apakah data sudah terdistribusi normal atau tidak:

- a. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* > nilai signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* < nilai signifikan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Semakin kecil nilai *tolerance* dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki *problem* heterokedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji heterokedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya model barlet dan rank *spearman* atau uji *spearman's*, metode grafik park gleyser. (Agus Widarjono 2013, Hal 113).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan analisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi menurut (Gujarati 2019), dapat diketahui dengan metode grafik, metode *durbin-watson*, metode *runtest*, dan uji *statistic non paramtrik*. Ada juga cara lain untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji *Lagrange Multiplier (LM Test)* dimana apabila probabilitas f hitung > α (5 %), maka bebas dari autokorelasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yang ditransformasi menjadi model *full* logaritma memiliki model persamaan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Log Y} = \beta_0 + \beta_1 \text{logX}_1 + \beta_2 \text{logX}_2 + \beta_3 \text{logX}_3 + e$$

Tabel 4
Hasil Regresi Linear Berganda

Log Y = β_0	+ $\beta_1 \text{logX}_1$	+ $\beta_2 \text{logX}_2$	+ $\beta_3 \text{logX}_3 + e$
Y	= 6,32	+ - 0,1608X ₁	+ - 0,6559X ₂ + 0,4361X ₃
SE	= (4,19)	(0,6653)	(0,4023) (0,1673)
tstat	= (1,50)	(- 2,4171)	(- 1,6304) (2,6062)
Prob	= (0,16)	(0,0362)	(0,1341) (0,0262)
R ²	= 0,433198		
Adjust R-Squared	= 0,263158		
Fstat	= 2,547619		
Prob (Fstat)	= 0,014727		

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan *EViews 8* adalah sebagai berikut :

$$\text{Log Y} = \beta_0 + \beta_1 \text{logX}_1 + \beta_2 \text{logX}_2 + \beta_3 \text{logX}_3 + e$$

$$\text{Log Y} = 6,327516 - 0,160818 \text{logX}_1 - 0,655945 \text{logX}_2 + 0,436125 \text{logX}_3 + e$$

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.263158 atau 26,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independen dalam hal ini KUR (X₁), jumlah penduduk (X₂) dan UMP (X₃) secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 26,32 % terhadap naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan menggunakan *eviews 8* dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,014727. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Prob (F-statistik) 0,014727 < $\alpha = 0.05$,

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Yang artinya semua variabel bebas (X₁, X₂, dan X₃) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi *eviews 8* menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Bebas (X₁ dan X₃) terhadap jumlah penduduk

miskin (Y) di Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan X_2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

1. Variabel Kredit Usaha Rakyat (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0362. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_1 $0,0362 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Kredit Usaha Rakyat (X_1) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Ini berarti sesuai dengan hipotesis pertama yaitu diduga kredit usaha rakyat berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Variabel jumlah penduduk (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1341. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_2 $0,1341 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel jumlah penduduk (X_2) tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Ini berarti hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yaitu diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Variabel upah minimum provinsi (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0262. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas X_3 $0,0262 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel upah minimum provinsi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini berarti tidak sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu diduga upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque Bera test* (J-B).

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
1,536137	0,463908

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jarque-Bera ($0,463908 > \alpha (0,05)$) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Koefisien	Centered VIF
C	17,62134	NA
LOG (X_1)	0,004427	21,98776
LOG (X_2)	0,161848	3,750942
LOG (X_3)	0,028003	26,76876

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Untuk melihat apakah model mengalami masalah multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, *variance inflation faktor* (VIF) pada X_1 (0,004427), X_2 (0,161848) dan X_3 (0,028003) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 6
Uji Breusch Pagan Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.736487	Prob. F(3,10)	0.5538
Obs*R-squared	2.533482	Prob. Chi-Square(3)	0.4693
Scaled explained SS	0.829816	Prob. Chi-Square(3)	0.8423

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji *Breusch Pagan Godfrey* menggunakan *Eviews 8* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi *R-squared* sebesar 0,4693 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), $0,4693 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui Uji *Breusch Godfrey Serial Correlation LM TEST* untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 7.
Uji Breusch Godfrey Serial Correlation LM TEST

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.640257	Prob. F(2,8)	0.5522
Obs*R-squared	1.931704	Prob. Chi-Square(2)	0.3807

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Hasil olahan data menunjukkan nilai Probabilitas *Chi Square* yang merupakan nilai *p value Breusch Godfrey Serial Correlation LM* adalah sebesar $0,3807 > 0,05$. Ini berarti H_0 diterima atau tidak ada masalah autokorelasi.

Berdasarkan persamaan dan hasil pengujian-pengujian di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 6.327516 menyatakan bahwa jika variabel KUR (X_1), variabel Jumlah Penduduk (X_2) dan Upah Minimum Provinsi (X_3) nilainya 0 (nol) atau konstan, maka nilai Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Minahasa Utara (Y) adalah sebesar 6.327516.
2. Secara parsial, Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai koefisien regresi kredit usaha rakyat sebesar -0.160818, yang artinya jika KUR mengalami kenaikan 1 %, maka diperkirakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara akan menurun sebesar 0.160818, dengan asumsi jumlah penduduk dan upah minimum provinsi tetap (konstan).

3. Secara parsial, jumlah penduduk (X_2) tidak berpengaruh dan bertanda negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -0.655945.
4. Secara parsial, upah minimum provinsi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai koefisien upah minimum provinsi sebesar 0.436125, yang artinya jika upah minimum provinsi mengalami kenaikan 1 %, maka diperkirakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara akan meningkat sebesar 0.436125, dengan asumsi KUR dan jumlah penduduk tetap (konstan).
5. Secara simultan, ditampilkan nilai prob (F-statistik) $0,014727 < \alpha = 0.05$ yang berarti KUR, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
6. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara dipengaruhi sebesar 26,32 % oleh naik turunnya KUR, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Kredit Perbankan dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini menggambarkan bahwa KUR yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara tepat sasaran karena dapat diberikan dan dimanfaatkan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan usaha sehingga meningkatkan pendapatan. Dengan adanya skala usaha masyarakat menjadi lebih besar maka sangat dibutuhkan banyak tenaga kerja karena adanya permintaan yang meningkat dan membuat semua aktivitas perekonomian masyarakat bergerak serta masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang termasuk usia angkatan kerja terserap dengan baik sehingga berdampak pada angka pengangguran berkurang, pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat meningkat yang tercermin dari taraf hidup masyarakat mengalami perubahan, dan hasil akhirnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Minahasa Utara mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tiara F. Rizkiyah dan Nunung Nurhayati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan” dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kredit BPR menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Kredit yang diberikan oleh BPR telah menyentuh masyarakat yang marginal (*poor people*). Kredit yang diberikan telah tepat sasaran, dilihat dari peruntukannya kredit yang di salurkan kepada masyarakat menengah ke bawah dan mikro digunakan untuk tujuan produktif yang tentunya akan meningkatkan pendapatan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BPR berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabilla (2022) berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang” dan

penelitian Utami (2021) berjudul “Pengaruh UMR dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016”, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan yang berarti bahwa bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terjadi belum dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal ini dikarenakan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Minahasa Utara termasuk penduduk *intermediate* yaitu *median* yang berarti bahwa umur penduduk berada di rentang usia 20-30 tahun. Ini menunjukkan mayoritas komposisi umur produktif (15-64 tahun) menjadi sumber tenaga kerja yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan daerah. Pada tahun 2022 kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi komposisi jumlah penduduk kabupaten Minahasa Utara sebesar 69,32 % atau 159.003 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduknya 229.368 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 58.82 %.

Tinggi atau rendahnya jumlah penduduk usia produktif tidak dapat mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara, sebab peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, pelatihan kerja, dan ekonomi ruang lingkup keluarga, daerah, dan nasional yang baik akan menciptakan sekaligus memanfaatkan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan atau setidaknya mempertahankan taraf hidup layak.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum Provinsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggriawan (2015), berjudul “Pengaruh Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur” yang menyatakan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum provinsi dapat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Ini terjadi akibat upah yang menurut perusahaan akan dianggap beban, lantaran upah adalah pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja sebagai salah satu input produksi. Oleh karena itu apabila upah semakin tinggi maka akan berdampak pada semakin kecilnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu upah yang semakin tinggi akan berdampak negatif pada perusahaan, sehingga apabila ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah maka *demand* tenaga kerja akan turun.

Berdasarkan teori pasar tenaga kerja dijelaskan bahwa apabila ada kenaikan upah maka akan terjadi penurunan tenaga kerja dan begitupun sebaliknya sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin (Pamungkas, 2017) dan Boediono Ekonomi Makro, 2014).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang semestinya dapat diberikan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berperan aktif dalam mendorong dan mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memfasilitasi bersama pihak perbankan dalam bentuk sosialisasi pendanaan KUR secara berkala bahkan pendampingan dengan memberikan pelatihan dan penghargaan yang memotivasi pelaku UMKM.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengevaluasi kebijakan yang telah ada terkait jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, dengan penyediaan banyak lapangan kerja baru dan mengutamakan penduduk Kabupaten Minahasa Utara dalam proses rekrutmennya.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berhati-hati dan serius menyikapi dalam mengambil kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi di tahun-tahun mendatang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kemiskinan.
4. Bagi perbankan atau lembaga keuangan di Kabupaten Minahasa Utara mendorong percepatan dan memperluas akses penyaluran KUR dengan prinsip kredit serta mendorong pelaku UMKM memanfaatkan KUR semaksimal mungkin.
5. Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara menempatkan KUR sebagai pilihan satu-satunya untuk memperoleh modal usaha di bank umum dan bank swasta.
6. Penulis berharap peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan untuk tahun-tahun kedepan demi penyempurnaan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data dan juga dapat menambah variabel lain jika diperlukan agar dapat menjelaskan secara utuh dan komprehensif tentang pengaruh kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, S. Y., Aris Soelistyo, & Dwi Susilowati 2016. *Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 14 No. 2 Hal. 219-231.*
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Penduduk*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Benoit, Kenneth. 2011. *Linear Regression Models with Logarithmic Transformations*. London: *Methodology Institute, London School of Economics.*
- Bhinadi, Ardito. 2017. *PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta). Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Boediono. 2014. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Costa, Prayoga Willem da. 2014. *Peran Pembiayaan Kur Bri Terhadap Perkembangan Umkm Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampulabaan Bank Bri Di Unit Sawojajar (Studi Pada Unit BRI Sawojajar)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, Hal 1-13*
- Darwin, Muhadjir M., 2005. *Memanusiakan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.

- Didu, Saharuddin & Ferri Fauzi. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No. 1, Hal. 100 – 114.*
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: UNDIP.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics* (4th ed.). New York: *The McGraw-Hill Companies*.
- Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2011. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati D. N., 2019. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Honohan, Patric. 2004. *Financial Development. Growth and Poverty: How Close are the Links?. World Bank Policy Research Working Paper 3203. February 2004.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. Pemerintah Pusat Indonesia. Jakarta.
- Jalilian, Hossein dan Colin Kirkpatrick. 2001. *Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries. Finance and Development Research Programme. Working Paper. Paper No. 30. Institute for Development Policy and Management. University of Manchester.*
- Jhingan, M. L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamungkas, P. A., & Agus Suman (2017), *Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011 – 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. 5 (2). Hal 1-20.*
- Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rumbayan, Meisye Ella J., Tri Oldy Rotinsulu & Mauna Theodore Beatrix Maramis. 2022. *Analisis Tingkat Penyaluran Kredit Bank Sulutgo. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 23, No. 4, Hal. 489 – 504.*
- Sachs, J.D. 2012. *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. The Lancet, 379, 2206-2211.*
- Muchdarsyah, Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Edisi kedua. Cetakan Keempat. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Pradhan, Rudra P. 2010. *The Nexus Between Finance. Growth and Poverty in India: The Cointegration and Causality Approach. Asian Social Science. 6 (9):114.*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. Pemerintah Pusat Indonesia. Jakarta
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Pemerintah Pusat Indonesia*. Jakarta
- Rivai Veithzal, Andria P. Veithzal & Ferry N Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rizkiyah, Tiara F. & Nunung Nurhayati. 2020. *Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Pengangguran terbuka Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. Jurnal Gema Wiralodra, Vol. 11, No. 2, Hal 311 – 326.*
- Salsabilla, Amadea. 2022. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 10, No. 1. Hal. 10 – 20.*
- Saputra, Tito., Een N. Walewangko & George M.V. Kawung. 2022. *Analisis Program Dana Kelurahan di Kota Kotamobagu (Studi Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat). Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol. 23, No. 4, Hal. 351 – 374.*
- Siregar, H. & Wahyuniarti, D. 2008. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Jurnal Ilmiah, 24 – 40.*

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. T. 2012. *Peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), 73 – 92.
- Utami, Wita & Tianovida Siregar. 2021. *Pengaruh UMR Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No. 1, Hal 254 – 264.
- Vinny A., Denny S. & Hainim K. 2014. *Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. JOM FEKON Vol 1, No. 2, Oktober 2014.*
- Walewangko, E. N. 2015. *Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Efisiensi*, Vol.15, No.4, Hal. 222 – 233.
- Widarjono, Agus. 2016. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Zhuang, Juzhong. Et.al. 2009. *Financial Sector evelopment. Economic Growth. and Poverty Reduction: A. Literature Review. ADB Economics Working Paper Series No. 137.*

